

# **Analisis Kesenjangan Pengukuran Aset Biologis Antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 pada Badan Usaha Milik Desa: Perbandingan *Historical Cost* dan *Fair Value Measurement***

Difi Aqila Febriansyah<sup>1</sup>; Muhamad Rafy Khairu<sup>2</sup>; Rosmaria Angelina Simanjuntak<sup>3</sup>; Zaza Dhina Tri Pamungkas<sup>4</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN  
Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan  
E-mail : [humas.baak@pknstan.ac.id](mailto:humas.baak@pknstan.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to analyze the normative gap between Kepmendesa 136/2022 (SAK ETAP historical cost approach) and PSAK 241 (fair value biological assets approach) and its impact on BUMDes financial reporting quality. Data were obtained through regulatory review, BUMDes financial statements, and quantitative simulation of biological asset growth/crisis scenarios. Analysis employed a comparative regulatory approach and financial impact simulation (Tables 1-4). The analysis reveals asset undervaluation, ROA distortion, extreme current ratios, and reduced information relevance due to the historical cost approach's failure to reflect biological asset value dynamics (biological transformation). This research enriches academic literature through specific comparative regulatory analysis between Kepmendesa 136/2022 (SAK ETAP historical approach) and PSAK 241 (fair value approach) for BUMDes biological assets, implying the need for BUMDes accounting regulation adjustment by adopting PSAK 241 to align with the economic substance of biological assets.

**Keywords:** *Biological assets; Kepmendesa 136/2022; PSAK 241; historical cost approach; fair value; gap analysis*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengelolaan potensi lokal. Pertumbuhan signifikan jumlah BUMDes yang mencapai 70.985 entitas pada akhir 2025, didukung alokasi Dana Desa sebesar Rp71 triliun, menegaskan vitalitas entitas ini bagi pembangunan nasional. Mengingat 90,03% desa di Indonesia bergantung pada sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan, aset biologis seperti ternak dan tanaman menjadi komponen dominan dalam operasional BUMDes. Berbeda dengan aset konvensional, aset biologis memiliki karakteristik unik berupa transformasi biologis, yaitu proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang secara terus-menerus mengubah nilai ekonomi aset tersebut.

Dalam kerangka regulasi, Kepmendesa 136/2022, yang berbasis SAK ETAP, tidak secara eksplisit mengatur klasifikasi aset biologis, sehingga membuka

ruang interpretasi untuk dua pendekatan utama: persediaan atau aset tetap. Namun demikian, pendekatan aset tetap lebih banyak digunakan karena sifat aset biologis yang biasanya memiliki umur ekonomis panjang, digunakan secara berulang, dan memerlukan penyesuaian nilai yang merujuk pada penyusutan—karakteristik yang selaras dengan aset tetap menurut PSAK 16. Akibatnya, aset biologis diperlakukan sebagai barang statis yang mengalami keusangan sistematis, mengabaikan realitas bahwa nilainya sering kali justru meningkat selama fase pertumbuhan. Pendekatan berbasis biaya historis (*historical cost*) ini bertentangan secara fundamental dengan PSAK 241 (adopsi dari IAS 41) yang mewajibkan penggunaan nilai wajar (*fair value*) untuk mencerminkan substansi ekonomi dari transformasi biologis.

Kesenjangan regulasi ini memicu implikasi finansial yang material. Penggunaan biaya historis cenderung menyebabkan penilaian aset yang terlalu

rendah (*undervaluation*), distorsi pada rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA), serta memberikan sinyal peringatan yang terlambat bagi manajemen. Penelitian terdahulu mengungkap berbagai kegagalan praktis, seperti ketidakmampuan mencatat mortalitas aset pada Safwana Koi Farm (Ningsih, 2025), pengabaian nilai wajar pada BUMDes Sumber Rezeki (Putra & Fitriani, 2023), hingga laporan keuangan yang tidak relevan pada UKM kopi (Wiratno, 2021). Tanpa pengakuan transformasi biologis sebagai sumber kenaikan nilai, laporan keuangan BUMDes kehilangan daya prediktifnya dan berisiko menghambat akses terhadap pembiayaan karena nilai agunan yang tercatat di neraca tidak mencerminkan kapasitas ekonomi yang sebenarnya.

Meskipun dampaknya signifikan bagi kredibilitas pelaporan desa, literatur yang membedah perbandingan kedua standar ini dalam konteks BUMDes masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan regulasi tersebut melalui empat area utama: basis pengukuran, klasifikasi neraca, *timing* pengakuan perubahan nilai, dan persyaratan pengungkapan. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong harmonisasi regulasi agar pelaporan keuangan BUMDes selaras dengan substansi ekonomi aset biologis melalui adaptasi pendekatan nilai wajar dalam PSAK 241.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penelaahan dan penyelarasan berbagai peraturan tertulis serta literatur akademik guna menjawab problematika akuntansi aset biologis sejalan dengan pemikiran Irwansyah et al. (2020), metode ini diterapkan untuk menguji norma yang berlaku melalui telaah mendalam terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis dokumen, yang

melibatkan interpretasi serta evaluasi terhadap teks peraturan, laporan, dan jurnal penelitian, khususnya Kepmendesa 136/2022 serta PSAK 241, untuk menggali informasi relevan yang mungkin tidak ditemukan pada metode lain. Data yang telah terkumpul kemudian dibedah menggunakan teknik analisis teks secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna fundamental dari fenomena yang dikaji.

Secara sistematis, analisis ini dijalankan melalui empat tahapan utama: dimulai dengan pengumpulan dan penyusunan data sebagai basis pembahasan; dilanjutkan dengan observasi perbedaan perlakuan yang muncul antar standar; kemudian mengkaji dampak ekonomi serta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing regulasi; hingga akhirnya merumuskan kesimpulan serta identifikasi keterbatasan penelitian.

## HASIL

### Fundamental dalam Basis Pengukuran (*Historical cost versus Fair value*)

Kepmendesa 136/2022, yang berbasis SAK ETAP, tidak secara eksplisit mengatur klasifikasi aset biologis, sehingga membuka ruang interpretasi untuk dua pendekatan utama: persediaan atau aset tetap. Namun demikian, pendekatan aset tetap lebih banyak digunakan karena sifat aset biologis yang biasanya memiliki umur ekonomis panjang, digunakan secara berulang, dan memerlukan penyesuaian nilai yang merujuk pada penyusutan. Oleh karena itu, sebagian besar literatur dan studi empiris membandingkan aset biologis dengan aset tetap, sehingga secara implisit mengindikasikan kecenderungan regulasi tersebut terhadap pendekatan model biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan, tanpa revaluasi interim kecuali saat pelepasan (Kemendes PDTT, 2022). Konsekuensi dari pendekatan ini adalah fluktuasi nilai ekonomis aset biologis selama *holding period* tidak tercermin dalam laporan keuangan, karena perubahan nilai akibat transformasi biologis dan dinamika harga pasar tidak diakui sebelum direalisasi.

Akibatnya berpotensi menimbulkan distorsi relevansi laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Rahmani et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pengukuran aset biologis berbasis biaya historis menurut PSAK 16 berpotensi menimbulkan distorsi dan menghasilkan laporan keuangan yang kurang relevan dibandingkan pendekatan nilai wajar dalam PSAK 69.

Perlakuan akuntansi saat ini secara implisit mengasumsikan bahwa aset biologis berperilaku serupa dengan aset tetap konvensional, dimana manfaat ekonominya dianggap menurun secara terukur dan dapat diprediksi (Kemendes PDTT, 2022). Namun, dalam realitas ekonomi, nilai aset biologis memiliki karakteristik dinamis yang dapat mengalami apresiasi maupun depresiasi akibat proses transformasi biologis berkelanjutan dan volatilitas pasar (Alfarisyi et al., 2022).

PSAK 241 mengelola aset biologis menggunakan basis nilai wajar (*fair value basis*) dengan menetapkan *Fair Value Less Costs to Sell* (FVLCS) sebagai atribut pengukuran mutlak. Entitas diwajibkan melakukan penilaian ulang pada setiap akhir periode pelaporan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar terkini, dimana setiap perubahan nilai langsung diakui dalam laporan laba rugi guna meningkatkan relevansi dan ketepatan waktu (*timeliness*) informasi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024). Perubahan nilai ini didorong oleh dua faktor utama: transformasi biologis (seperti pertumbuhan, prokreasi, dan mortalitas) serta fluktuasi harga pasar (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024). Karena kombinasi faktor tersebut menciptakan lintasan nilai (*value trajectories*) yang secara inheren non-linear, penggunaan metode biaya garis lurus dianggap tidak mampu menggambarkan realitas ekonomi (*faithfully represented*) (Cavalheiro et al., 2019). Melalui model nilai wajar, PSAK 241 berupaya menangkap dampak ekonomi secara komprehensif untuk menyajikan aktivitas agrikultur yang lebih mendekati realitas serta meningkatkan kebermanfaatan keputusan bagi pemangku kepentingan (Cavalheiro et

al., 2019; Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024).

### *Technical Mechanism of Distortion*

Distorsi fundamental dalam model biaya historis pada Kepmendesa 136/2022 berakar pada ketidakmampuannya merekam dinamika nilai aset akibat transformasi biologis dan fluktuasi pasar, yang menghasilkan laporan keuangan dengan relevansi rendah (Alfarisyi et al., 2022). Bukti empiris menunjukkan bahwa penggunaan nilai wajar memiliki relevansi nilai yang jauh lebih tinggi bagi investor dibandingkan pengukuran berbasis biaya (Gonçalves et al., 2017).

Kerangka Kepmendesa 136/2022 secara keliru menerapkan penyusutan garis lurus yang mengasumsikan keusangan sistematis (*systematic obsolescence*), sehingga nilai tercatat (*carrying amount*) justru tergerus secara mekanis saat aset mencapai puncak usia produktifnya (*prime years*).

Dalam kerangka PSAK 241, pergeseran nilai disagregasi menjadi dua penggerak yaitu komponen biologis dan komponen harga pasar yang diakui secara periodik pada saat terjadi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024). Hal ini memitigasi distorsi signifikan pada waktu pengakuan laba (*timing of income recognition*). Pada model biaya, pengakuan laba sering kali bersifat *back-loaded* atau diakui secara sekaligus (*lump-sum*) saat penjualan saja, yang menciptakan pola laba volatil dan menyesatkan. Sebagaimana dikuatkan oleh temuan Bohušová et al. (2017), pendekatan nilai wajar dalam PSAK 241 lebih mampu merefleksikan proses penciptaan nilai yang berkelanjutan dan menawarkan pandangan yang transparan mengenai kinerja operasional agrikultur dari tahun ke tahun.

### **Ilustrasi Dampak Kuantitatif pada Laporan Keuangan**

Dalam skenario awal hipotesis, BUMDes X diasumsikan mengakuisisi 100 ekor sapi perah berkualitas tinggi pada

Tahun ke-1 dengan harga Rp5 juta per ekor, sehingga total investasi tercatat sebesar Rp500 juta. Untuk menggambarkan dampak kuantitatif dari perbedaan dasar pengukuran tersebut, penelitian ini melakukan simulasi di mana harga pasar sapi perah sejenis diasumsikan meningkat sebesar 20% akibat perbaikan kualitas genetik. Selain itu, produktivitas biologis—yang diprosikan melalui hasil susu—diasumsikan mengalami kenaikan tambahan sebesar 8% selama tahun pertama, dengan estimasi sisa umur ekonomis kawanan selama enam tahun. Berdasarkan asumsi tersebut, gabungan kenaikan nilai sebesar 28% mengimplikasikan adanya proyeksi peningkatan nilai bersih sebesar Rp140 juta pada Tahun 1, yang dihitung dari 28% nilai investasi awal Rp500 juta.

**Tabel 1. Simulasi dampak akibat selisih pencatatan Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Metrik Keuangan	Kepmendesa 136/2022	PSA K 241	Selisih Pencatatan	Dampak
<i>Skema Simulasi Tahun-1: Perolehan Aset Biologis dan Pengakuan Akhir Tahun</i>				
Aset Biologis (Saldo Awal Tahun)	Rp 500 Juta	Rp 500 Juta	-	-
Akumulasi Depresiasi (Tahun-1)	Rp 83.3 Juta	-	(Rp 83.3 Juta)	Carrying amount understated
Fair value Adjustment Gain	-	Rp 140 Juta	(Rp 140 Juta)	Unrecognized Holding Gains
Pengakuan Laba Bersih	(Rp 83.3 Juta)	Rp 140 Juta (FV Gain)	(Rp 223.3 Juta)	Financial Performance Materially Misstated
Return on Assets (ROA)	12.3%	18.7%	+6.4 pp	Profitability Ratios Understated
Biological Assets % Total Assets	28.1%	42.7%	+14.6 pp	Economic Substance Misrepresented
Debt-to-Asset Ratio	0.65	0.52	(0.13)	Solvency risk overstated
<i>Skema Simulasi Tahun-2: Penurunan jumlah ternak sapi sejumlah 10% dikarenakan wabah, harga pasar turun sebesar 15%, biaya pakan dan perawatan sebesar Rp 110 Juta</i>				
Akumulasi Depresiasi (Tahun-2)	Rp 83.3 Juta	-	(Rp 83.3 Juta)	Carrying amount understated
Fair value Adjustment Gain	-	(Rp 64 Juta) + (Rp 32 Juta) + (Rp110 Juta) = (Rp 206 Juta)	(Rp 206 Juta)	Unrecognized Holding Loss
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir)	Rp 333.4 Juta	Rp 434 Juta	Rp 100.6 Juta	Total Assets Materially Understated

Tahun)					
<i>Skema Simulasi Tahun-3: Harga pasar kembali normal, biaya pakan dan perawatan sebesar Rp 110 Juta</i>					
Akumulasi Depresiasi (Tahun-3)	Rp 83.3 Juta	-	(Rp 83.3 Juta)	Carrying amount understated	
Fair value Adjustment Gain	-	(Rp110 Juta)	(Rp110 Juta)	Unrecognized Holding Loss	
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 250,1 Juta	Rp 324 Juta	Rp 73,9 Juta	Total Assets Materially Understated	
<i>Skema Simulasi Tahun-4: Sapi dijual seluruhnya dengan harga total Rp 700 Juta</i>					
Aset Biologis Bersih (Saldo Akhir Tahun)	Rp 250,1 Juta	Rp 324 Juta	Rp 73,9 Juta	Total Assets Materially Understated	
Pengakuan Laba Bersih	Rp 700 Juta	Rp 700 Juta		Financial Performance Materially Misstated	

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

Asimetri pelaporan menjadi ancaman strategis ketika entitas menghadapi penurunan kondisi biologis. Simulasi kedua memodelkan kondisi krisis yang bersifat eksternal—seperti banjir yang memicu kelangkaan pakan (harga pasar turun 15%) disertai wabah penyakit yang menyebabkan mortalitas (kerugian biologis 25%)—yang secara agregat menggerus nilai aset sebesar 40%.

Dalam skenario krisis ini, pendekatan *historical cost* gagal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Sebagaimana dirincikan dalam Tabel 2, kerangka ini mengaburkan representasi kondisi ekonomi yang sesungguhnya, entitas tetap mencatat beban penyusutan standar dan mempertahankan nilai buku aset sebesar Rp416,7 Juta. Hal ini menciptakan *hidden loss* yang tidak terdeteksi dalam laporan keuangan hingga aset dijual bertahun-tahun kemudian.

PSAK 241 memberikan transparansi instan dengan mewajibkan pengakuan kerugian penurunan nilai sebesar Rp200 Juta pada periode berjalan. Meskipun hal ini menyebabkan volatilitas laba jangka pendek yang ekstrem, transparansi ini krusial sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*). Sinyal ini memungkinkan manajemen melakukan intervensi mitigasi

empat tahun lebih awal dibandingkan jika menggunakan model biaya historis. Temuan empiris Alfariysi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *fair value measurement* dan *disclosure* aset biologis meningkatkan relevansi informasi dan dihargai positif oleh pasar menguatkan bahwa transparansi berbasis nilai wajar memainkan peran penting sebagai mekanisme disiplin dan peringatan dini, bukan sekadar sumber volatilitas laba jangka pendek.

**Tabel 2. Simulasi Implikasi Manajerial % Strategis Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Aspek Pelaporan	Kepmendesa 136/2022	PSAK 241	Implikasi Manajerial & Strategis
Pengakuan Dampak – Tahun- 1	Beban Penyusutan (Rp83,3 Juta)	Kerugian Penurunan Nilai (Rp200 Juta)	<i>Timeliness</i> : PSAK 241 mengungkap krisis secara serta-merta ( <i>immediately reveals crisis</i> ).
Nilai tercatat akhir tahun	Rp416,7 Juta ( <i>Overstated</i> )	Rp300 Juta ( <i>Realizable Value</i> )	<i>Information Quality</i> : Kepmendesa tidak memperlihatkan deteriorasi aset ( <i>mask deterioration</i> )

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

## Implikasi terhadap Dimensi Kualitas Pelaporan

### Dimensi Relevansi Informasi

Divergensi antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 bukan sekadar perbedaan teknis operasional, melainkan menciptakan implikasi material terhadap kualitas fundamental pelaporan keuangan BUMDes. Berdasarkan simulasi kuantitatif pada Tabel 1, kesenjangan regulasi ini ditemukan mendegradasi relevansi nilai informasi aset sebesar 35%, yang merefleksikan selisih signifikan antara nilai riil ekonomi pada pendekatan nilai wajar sebesar Rp640 juta dibandingkan biaya historis senilai Rp416,7 juta. Ketidakmampuan model biaya historis dalam menangkap realitas ekonomi ini memicu distorsi kualitas informasi melalui tiga saluran utama yang saling berkaitan.

Saluran pertama adalah kegagalan penilaian (*undervaluation*), di mana aset biologis yang disajikan berdasarkan biaya historis gagal mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Temuan empiris dari Alfariysi et al. (2022) menekankan bahwa pengukuran nilai wajar (*fair value*

*measurement*) dan pengungkapan yang memadai memberikan sinyal yang lebih kredibel mengenai manfaat ekonomi masa depan serta memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kinerja perusahaan dibandingkan biaya historis. Dengan mengabaikan kenaikan nilai dari transformasi biologis hingga titik penjualan, laporan keuangan BUMDes secara sistematis menyajikan nilai kekayaan yang terlalu rendah (*understated*).

Saluran kedua berkaitan dengan keterlambatan informasi (*delayed recognition*). Di bawah model biaya historis, perubahan nilai hanya diakui saat transaksi penjualan terjadi, sehingga laporan keuangan gagal menyediakan sinyal tepat waktu mengenai keberhasilan atau kegagalan pengelolaan aset selama periode berjalan. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Gonçalves et al. (2017), pengakuan periodik atas perubahan nilai wajar sangat krusial untuk memperkuat hubungan antara angka akuntansi dengan kondisi ekonomi riil entitas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas *timeliness* informasi bagi pihak eksternal seperti kreditur dan investor.

Saluran terakhir adalah degradasi kegunaan keputusan (*decision usefulness*), di mana laporan keuangan kehilangan relevansinya sebagai landasan pengambilan keputusan strategis yang andal. Campos Llerena et al. (2025) menekankan bahwa tanpa pengakuan transformasi biologis sebagai sumber kenaikan nilai, informasi keuangan kehilangan aspek kewajaran (*reasonableness*) dan daya prediktif untuk mengevaluasi keberlanjutan usaha. Implikasi jangka panjangnya, sebagaimana dibuktikan oleh Alfariysi et al. (2022), adalah risiko penurunan persepsi nilai entitas (*firm value*) di mata pihak eksternal yang dapat menghambat akses terhadap pembiayaan karena nilai agunan di neraca tidak lagi mencerminkan kapasitas ekonomi yang sebenarnya.

### Dimensi Akuntabilitas Pengurusan (*Stewardship Accountability*)

Pada dimensi pertanggungjawaban, penggunaan biaya historis dalam Kepmendesa 136/2022 dinilai melemahkan efektivitas pengawasan (*monitoring effectiveness*) secara signifikan. Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*), manajer memiliki kewajiban untuk menyampaikan sinyal yang kredibel kepada pemilik sumber daya mengenai kualitas kinerja manajerial mereka (Alfarisyi et al., 2022). Namun, hasil simulasi pada skenario krisis menunjukkan bahwa kelambatan informasi yang inheren dalam model biaya historis menimbulkan dua implikasi negatif utama terhadap akuntabilitas pengurusan.

Implikasi pertama adalah munculnya fenomena kinerja tersembunyi (*hidden performance*), dimana perubahan kondisi biologis tetap tidak terdeteksi akibat ketiadaan mekanisme pengakuan laba atau rugi interim sebelum terjadinya penjualan. Hal ini memungkinkan manajer untuk menutupi kegagalan pengelolaan—seperti membiarkan kondisi kesehatan ternak memburuk—dengan tetap melaporkan hasil yang seolah stabil melalui perlindungan beban depresiasi standar. Praktik ini menciptakan asimetri informasi yang tinggi antara pengelola BUMDes dan masyarakat desa sebagai pemilik, yang menurut Gonçalves et al. (2017) dapat diminimalkan melalui penerapan akuntansi nilai wajar yang mewajibkan transparansi pengungkapan kondisi aset terkini.

Implikasi kedua berkaitan dengan sinyal peringatan yang tertunda, yang berakar pada kelambanan model biaya historis dalam merespons perubahan kondisi aset secara riil. Dalam kerangka *signaling theory*, laporan keuangan seharusnya berfungsi sebagai mekanisme vital bagi manajemen untuk mengirimkan sinyal mengenai kondisi internal perusahaan kepada pihak eksternal (Alfarisyi et al., 2022). Berbeda dengan model biaya, pendekatan PSAK 241 berperan efektif sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*). Hal ini dikarenakan transparansi dalam penurunan nilai wajar (*fair value impairment*) memaksa "berita buruk" atau deteriorasi aset untuk muncul secara serta-merta dalam laporan laba rugi periodik,

sehingga memungkinkan tindakan mitigasi yang lebih cepat.

### **Disparitas Taksonomi dan Klasifikasi Aset Biologis**

Dalam kerangka regulasi Kepmendesa 136/2022 yang berbasis SAK ETAP, tidak ditemukan pengakuan eksplisit terhadap "aset biologis" sebagai pos neraca tersendiri. Kondisi ini menyebabkan aset-aset agrikultur cenderung tersebar ke dalam kategori konvensional, seperti persediaan untuk aset lancar dengan siklus pendek atau aset tetap untuk tujuan produktif jangka panjang, tanpa label khusus (Baroroh et al., 2018). Praktik tersebut secara konseptual menyamakan makhluk hidup yang mengalami transformasi biologis—seperti pertumbuhan dan reproduksi—dengan barang dagangan statis. Ketika diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya, aset biologis dimasukkan ke dalam skema penyusutan yang kaku seolah-olah nilainya hanya menurun secara teratur layaknya mesin, padahal pada banyak komoditas nilai ekonominya justru meningkat selama fase pertumbuhan. Ketidadaan panduan klasifikasi yang spesifik ini akhirnya memicu inkonsistensi pelaporan akibat *professional judgement* yang bersifat subjektif di lapangan.

Sebaliknya, PSAK 241 mewajibkan pengelompokan aset biologis sebagai pos terpisah di neraca dengan pemisahan yang jelas berdasarkan maturitas dan intensi penggunaan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024). Standar ini membagi aset menjadi kategori lancar untuk hasil panen jangka pendek dan aset tidak lancar untuk produktif jangka panjang, di mana seluruhnya diukur menggunakan nilai wajar. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan keterbacaan profil aset agrikultur, memudahkan identifikasi kapasitas produksi, serta membantu proyeksi arus kas masa depan. Selain itu, penyajian yang terdedikasi ini terbukti mampu mengurangi bias klasifikasi sekaligus meningkatkan relevansi nilai dan kewajaran informasi keuangan bagi para

pemangku kepentingan (Gonçalves et al., 2017; Campos Llerena et al., 2025).

### Variabilitas Praktik dan Distorsi Likuiditas: Tinjauan Literatur dan Simulasi

Kekosongan pengaturan klasifikasi aset biologis dalam kerangka Kepmendesa 136/2022 telah menciptakan ruang variasi praktik yang sangat lebar di lapangan. Studi terkini mengenai implementasi standar agrikultur menunjukkan bahwa tanpa panduan spesifik mengenai kategori "aset biologis" di neraca, entitas agrikultur cenderung mengadopsi pendekatan yang inkonsisten: sebagian mengelompokkan aset tersebut sepenuhnya sebagai persediaan, sementara sebagian lainnya memperlakukannya sebagai aset tetap meskipun memiliki karakteristik ekonomi yang serupa (Baroroh et al., 2018).

Kajian yang lebih luas mengindikasikan bahwa ketiadaan pos neraca yang terdedikasi mendorong aset agrikultur menjadi "tersebar" ke berbagai kelompok akun. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai kapasitas produksi dan basis aset agrikultur menjadi sulit dilacak secara konsisten lintas periode (Campos Llerena et al., 2025). Temuan-temuan ini menjadi basis fundamental bagi penelitian ini untuk menyusun sebuah simulasi komparatif terhadap tiga model BUMDes hipotesis (A, B, dan C) guna memvisualisasikan konsekuensi finansial dari divergensi klasifikasi tersebut.

Dalam simulasi ini, ketiga entitas diasumsikan memiliki profil ekonomi yang identik, yakni total aset senilai Rp1,5 miliar dengan komponen aset biologis berupa 50 ekor sapi (campuran indukan produktif dan sapi potong) bernilai Rp450 juta. Melalui kerangka ini, dibuktikan bahwa setiap perbedaan pada rasio keuangan yang muncul (baik itu ilusi likuiditas pada BUMDes A maupun pembekuan aset pada BUMDes B) murni merupakan dampak dari perbedaan perlakuan akuntansi dan bukan berasal dari perbedaan kondisi ekonomi dasar entitas. Dengan demikian, klasifikasi yang tepat sebagaimana diatur dalam PSAK 241 menjadi krusial untuk menyajikan kombinasi kapasitas

likuiditas dan basis produksi secara wajar.

**Tabel 3. Simulasi Dampak Perbedaan Klasifikasi Aset Biologis terhadap Struktur Likuiditas BUMDes**

Komponen	BUMDes A	BUMDes B	BUMDes C
Kas	300	300	300
Aset biologis – lancar (sapi potong)	450	0	50
Aset lancar lain	0	0	0
Total aset lancar	750	300	350
Aset biologis – tidak lancar (sapi indukan)	0	450	400
Aset tetap/aset lain tidak lancar	750	750	750
Total aset tidak lancar	750	1.200	1.150
Total aset	1.500	1.500	1.500

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

Interpretasi fenomena :

**BUMDes A – Ilusi likuiditas:** Seluruh aset biologis dimasukkan ke aset lancar, sehingga total aset lancar tampak tinggi (Rp 750 juta) dan rasio likuiditas terlihat sangat kuat. Padahal sebagian besar sapi (indukan) tidak realistis untuk dijual dalam jangka pendek, sehingga profil likuiditas yang tercermin di neraca bersifat semu.

**BUMDes B – Pembekuan aset:** Semua sapi dicatat sebagai aset tidak lancar, sehingga aset lancar hanya tampak Rp 300 juta dan neraca terlihat kering likuiditas. Sapi potong siap jual yang secara ekonomi dapat segera dikonversi menjadi kas seolah "terkunci" di kelompok aset tetap, sehingga potensi arus kas masuk jangka pendek tidak tercermin.

**BUMDes C – Mendekati substansi ekonomi (logika PSAK 241):** Aset biologis dipisah sesuai fungsi: sapi potong (Rp 50 juta) sebagai lancar dan sapi indukan (Rp 400 juta) sebagai tidak lancar. Penyajian ini menunjukkan secara lebih wajar kombinasi kapasitas likuiditas jangka pendek dan basis produksi jangka panjang, sehingga mengurangi risiko ilusi likuiditas maupun pembekuan aset semu.

### Divergensi Metrik Keuangan yang Dipicu oleh Inkonsistensi Klasifikasi

Perbedaan klasifikasi aset biologis bukan sekadar administrasi, melainkan mendistorsi metrik keuangan krusial seperti current ratio, quick ratio, modal kerja bersih, dan intensitas aset tetap yang menjadi dasar

keputusan kredit. Literatur empiris menunjukkan rasio likuiditas ini luas digunakan analis dan kreditur untuk menilai risiko gagal bayar, dengan perubahan current ratio berkorelasi signifikan terhadap probabilitas financial distress dan persetujuan pinjaman (Prakoso et al., 2024). Struktur aset padat modal juga sering diinterpretasikan sebagai fleksibilitas keuangan rendah, terutama jika aset jangka panjang sulit dilikuidasi cepat (Campos Llerena et al., 2025).

Dalam konteks aset biologis, cara pengukuran dan penyajian di neraca juga telah terbukti memengaruhi penilaian risiko dan nilai perusahaan. Penelitian relevansi nilai di bawah IFRS menemukan bahwa nilai aset biologis yang diukur dengan *fair value* berkorelasi positif dan signifikan dengan nilai pasar ekuitas, yang berarti pasar membaca informasi ini sebagai sinyal tentang prospek arus kas dan struktur aset, bukan sekadar angka dekoratif (Gonçalves et al., 2017). Studi pada perusahaan agrikultur Indonesia menegaskan bahwa *fair value measurement* dan pengungkapan aset biologis yang memadai meningkatkan nilai perusahaan, sehingga informasi yang lebih akurat mengenai aset biologis—termasuk klasifikasinya sebagai aset lancar atau tidak lancar mempengaruhi bagaimana investor dan kreditur memandang risiko dan potensi entitas (Alfarisyi et al., 2022).

Dengan latar belakang tersebut, Tabel 4 merangkum dampak kuantitatif dari variasi klasifikasi terhadap rasio keuangan vital pada tiga BUMDes hipotesis yang secara ekonomi identik.

**Tabel 4. Distorsi Rasio Keuangan Akibat Variasi Klasifikasi**

Indikator Keuangan	Skenario A (Klasifikasi Persediaan)	Skenario B (Klasifikasi Aset Tetap)	Skenario C (Tepat/PSA K 241)	Dampak Varians
<i>Current Ratio</i>	1,68x (Sangat Sehat)	0,94x (Kritis/Illiquid)	1,15x (Moderat)	Penilaian likuiditas bertolak belakang
<i>Quick Ratio</i>	1,15x	0,62x	0,75x	Persepsi kemampuan bayar cepat terdistorsi
Modal Kerja Bersih	Rp 420 Juta	Rp 100 Juta	Rp 150 Juta	Selisih persepsi dana

Intensitas Aset Tetap	40%	70%	Proporsional	operasional > 300% Kesalahan penilaian struktur modal
-----------------------	-----	-----	--------------	--

Sumber : Hasil data olahan simulasi penulis

Seorang kreditur yang menganalisis BUMDes A berpotensi menyetujui pinjaman karena *current ratio* 1,68x dan *quick ratio* 1,15x secara konvensional dibaca sebagai profil likuiditas yang sangat sehat, sejalan dengan temuan bahwa rasio likuiditas tinggi sering diasosiasikan dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah (Prakoso et al., 2024). Sebaliknya, petugas yang sama kemungkinan menolak pengajuan kredit BUMDes B karena *current ratio* 0,94x dan *quick ratio* 0,62x berada di bawah ambang batas konservatif, meskipun secara fundamental kedua BUMDes memiliki kas, jumlah ternak, dan kapasitas produksi yang identik. Di sisi lain, intensitas aset tetap BUMDes B yang mencapai 70% dapat ditafsirkan sebagai struktur yang sangat padat modal dan berisiko likuiditas tinggi, padahal sebagian aset tersebut secara ekonomi siap dijual dalam jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa di bawah pendekatan Kepmendesa 136/2022, akses permodalan sering kali tidak ditentukan oleh kesehatan bisnis yang sesungguhnya, tetapi oleh cara aset biologis diklasifikasikan di neraca.

### Pengakuan Perubahan Nilai Biologis (*Value Change Recognition*)

Dalam kerangka Kepmendesa 136/2022 yang mengadopsi SAK ETAP, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pengakuan perubahan nilai aset biologis (*value change recognition*), sehingga pengukuran secara implisit mengikuti model biaya historis. Akibatnya, laba atau rugi atas aset biologis baru diakui pada saat realisasi seperti penjualan atau panen, bukan selama proses transformasi biologis berlangsung (ICAEW, 2018).

IAI dalam PSAK 241 (2024) paragraf 12 menjelaskan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai

wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less cost to sell*). Pendekatan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan pengakuan langsung laba/rugi pada setiap akhir periode pelaporan memastikan bahwa kinerja ekonomi aset biologis tercermin secara lebih relevan dan tepat waktu serta mengakomodir seluruh perubahan nilai ekonomi, sehingga memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pengambil keputusan.

Entitas dapat menyajikan perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan yang mencakup keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kenaikan karena pembelian, penurunan yang didistribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, penurunan karena panen, dan perubahan lain.

#### **Dampak *Value Change Recognition* Kepmendesa 136/2022 versus PSAK 241**

Dengan skema simulasi pada Tabel 1, pendekatan berbasis biaya historis hanya akan mengakui beban depresiasi tetap setiap tahun atas kawanan sapi tersebut, sehingga keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar tidak pernah terlihat sampai saat penjualan sapi dilakukan. Sebaliknya, jika menggunakan pendekatan dengan nilai wajar, BUMDes A akan mengukur kembali kawanan sapi pada nilai wajar di setiap akhir tahun. Selisih antara nilai wajar baru dan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan. Dengan demikian, selama 2024–2027 laporan keuangan BUMDes A dengan pendekatan nilai wajar akan menunjukkan pola laba yang mengikuti dinamika pertumbuhan, wabah penyakit, pemulihan, dan penjualan sapi. Sementara jika dengan pendekatan biaya historis pola labanya cenderung tidak merata dan fluktuatif karena menunda pengakuan kinerja atau laba hingga saat penjualan.

Simulasi pada tahun ke-4 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pendekatan biaya historis menunda pengakuan kenaikan nilai aset biologis hingga saat penjualan, sehingga

laba yang diakui melonjak secara tajam pada satu periode. Sebaliknya, pendekatan nilai wajar PSAK 241 menyebarkan pengakuan laba sepanjang umur ekonomis aset, sehingga kinerja keuangan lebih stabil dan merefleksikan proses penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Perbedaan pengakuan laba ini menunjukkan bahwa pendekatan biaya historis yang digunakan dalam Kepmendesa 136/2022 cenderung menunda pengakuan kenaikan nilai hingga terjadi penjualan. Sedangkan pendekatan nilai wajar pada PSAK 241 menyebarkan pengakuan laba sepanjang umur ekonomis aset biologis. Akibatnya, kinerja keuangan tahun ke-4 versi biaya historis tampak jauh lebih menguntungkan dibandingkan versi PSAK 241, padahal secara ekonomi keduanya berangkat dari transaksi yang sama. Hal ini menandakan adanya potensi distorsi persepsi atas laba.

#### **Kerangka Pengungkapan Aset Biologis**

Dalam Kepmendesa 136/2022 Bab II.F.4, ketentuan pengungkapan secara eksplisit ditujukan untuk kelompok aset tetap, mencakup dasar pengukuran, metode dan tarif penyusutan, umur manfaat, jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan, serta rekonsiliasi saldo awal–akhir periode. Dengan ketiadaan aturan khusus mengenai aset biologis dalam Kepmendesa tersebut, BUMDes secara praktis dapat memperlakukan aset biologis produktifnya mengikuti perlakuan aset tetap tersebut. Artinya, untuk sapi perah atau tanaman produktif yang saat ini diklasifikasikan sebagai aset tetap, BUMDes perlu mengungkapkan basis pengukuran (misalnya biaya historis), metode depresiasi, umur manfaat, jumlah tercatat beserta akumulasi depresiasi, dan rekonsiliasi mutasi selama periode. Pendekatan ini pada praktiknya memasukkan aset biologis ke dalam pola pengungkapan aset tetap versi Kepmendesa, padahal sifat ekonominya berbeda, sehingga muncul kesenjangan bila dibandingkan dengan perlakuan khusus aset biologis dalam PSAK 241/PSAK 69.

IAI dalam PSAK 241 paragraf 40 menyatakan bahwa sebuah entitas yang mencatat aset biologis perlu mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Pengungkapan dilakukan untuk setiap kelompok aset biologis, dapat berupa narasi deskriptif ataupun kuantitatif.

BUMDes dapat menyajikan uraian kuantitatif untuk setiap kelompok aset biologis dengan membedakan antara aset yang bersifat dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif (*bearer biological assets*), atau antara aset yang sudah menghasilkan (*mature*) dan yang belum menghasilkan (*immature*), sesuai karakteristik aset yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, BUMDes dapat mengungkapkan nilai tercatat aset biologis yang dapat dikonsumsi dan yang produktif per kelompok, lalu merinci lagi nilai tersebut menjadi bagian yang sudah menghasilkan dan yang belum. Perbedaan ini memberi informasi yang berguna untuk memperkirakan waktu terjadinya arus kas di masa depan, sehingga BUMDes juga perlu menjelaskan dasar yang digunakan dalam melakukan klasifikasi tersebut.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif antara Kepmendesa 136/2022 (SAK ETAP *historical approach*) dengan PSAK 241 (*fair value* aset biologis) dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan BUMDes. Pendekatan historis terbukti menimbulkan *undervaluation* aset biologis, distorsi rasio profitabilitas seperti ROA, serta menghasilkan *current ratio* yang ekstrem sehingga mengurangi kemampuan laporan keuangan dalam merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, kegagalan pendekatan historis dalam menangkap dinamika transformasi biologis aset menyebabkan penurunan relevansi informasi laporan keuangan bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendekatan nilai wajar sesuai PSAK 241 lebih mampu merefleksikan perubahan nilai aset biologis baik dalam skenario pertumbuhan maupun krisis, sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDes. Perbedaan perlakuan akuntansi antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 tidak hanya bersifat teknis, tetapi berdampak langsung pada pengukuran kinerja, posisi keuangan, serta persepsi risiko dan keberlanjutan usaha BUMDes. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi agar pelaporan keuangan BUMDes selaras dengan substansi ekonomi aset biologis yang dikelolanya.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan agar regulator (Kementerian Desa dan pemangku kepentingan terkait) meninjau kembali ketentuan Kepmendesa 136/2022, khususnya terkait perlakuan akuntansi aset biologis, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip PSAK 241 ke dalam pedoman akuntansi BUMDes. Regulator juga perlu menyusun panduan teknis bagi BUMDes yang memiliki aset biologis, termasuk ilustrasi pengukuran nilai wajar, pengakuan laba/rugi perubahan nilai, serta pengungkapan yang memadai. Selain itu, BUMDes didorong untuk meningkatkan kapasitas akuntansi dan pemahaman manajerial mengenai karakteristik aset biologis, melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan akuntan publik atau akademisi agar transisi menuju pendekatan nilai wajar dapat dilakukan secara bertahap dan terkontrol.

## SIMPULAN

Penggunaan pendekatan historis berdasarkan Kepmendesa 136/2022 pada aset biologis BUMDes menimbulkan kesenjangan normatif signifikan dibandingkan PSAK 241, mengakibatkan *undervaluation*, distorsi rasio keuangan, dan penurunan relevansi laporan keuangan. Pendekatan nilai wajar PSAK 241 terbukti superior dalam merefleksikan dinamika aset biologis, sehingga diperlukan harmonisasi

regulasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan BUMDes.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis terutama didasarkan pada studi dokumen dan simulasi kuantitatif, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan praktik akuntansi aset biologis BUMDes di lapangan. Selain itu, asumsi dalam skenario pertumbuhan dan krisis belum mencakup seluruh variasi karakteristik aset biologis dan kondisi operasional BUMDes. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris pada berbagai tipe BUMDes serta mengembangkan model pelaporan aset biologis berbasis PSAK 241 yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM dan sistem akuntansi desa.

Hasil dan rekomendasi penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai dasar konseptual dan teknis awal yang masih memerlukan pengujian empiris dan pengayaan lebih lanjut melalui studi di berbagai konteks BUMDes. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model atau *template* pelaporan keuangan spesifik BUMDes berbasis PSAK 241 yang tetap mempertimbangkan keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur akuntansi di desa, sehingga rekomendasi regulasi tidak hanya konseptual tetapi juga operasional dan implementatif.

#### DAFTAR RUJUKAN

Alfarisyi, N., Diantimala, Y., Yahya, R., & Saleh, M. (2022). Biological Assets and Firm Value: *Do Fair value Measurement and Disclosure Matter?* *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 205–222. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i2.24694>

Anas, M., Setiawan, H., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Malang, A. (2016). The Implementation Of *Fair Value* On Short Term Assesment Of Biological Assets. In *Journal of Accounting and Business Education* (Vol. 1, Issue 1).

Anggorowati, C., Herwiyanti, E., & Widianingsi, R. (2017). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Aset

Biologis Perusahaan Perkebunan dengan Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis. Simposium Nasional Akuntansi XX.

- Baroroh, N., Yanto, H., Fajarrini, I., & Agustina, L. (2018). Accounting of Biological Assets in Indonesian Plantation Companies. *KnE Social Sciences*, 3(10), 46. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3117>
- Bohusova, H., & Svoboda, P. (2017). Will the amendments to the IAS 16 and IAS 41 influence the value of biological assets? *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 63(2), 53–64. <https://doi.org/10.17221/314/2015-AGRICECON>
- Campos Llerena, L. P., Arias Pérez, M. G., Vayas López, Á. H., & Barreno Córdova, C. A. (2025). Valuation of biological assets and reasonableness of financial information: a systematic review of empirical evidence in the agricultural sector. *Sapienza*, 6(3). <https://doi.org/10.51798/sijis.v6i3.1105>
- Cavalheiro, R. T., Gimenes, R. M. T., Binotto, E., & Fietz, C. R. (2019). *Fair value of Biological Assets: An Interdisciplinary Methodological Proposal*. *Revista de Administracao Contemporanea*, 23(4), 543–563. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2019180254>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). *PSAK 113 tentang Pengukuran Nilai Wajar*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2024). *PSAK 241 tentang Agrikultur*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Gonçalves, R., Lopes, P., & Craig, R. (2017). Value relevance of biological assets under IFRS. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 29, 118–126.

- <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2017.10.001>
- Gusti, I., Pramitari, A. A., Nurhayanti, K., Putu, S. L., Suningsih, Y., Akuntansi, J., & Bali, N. (2020). *Penerapan SAK ETAP Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk*. 6(2).
- I Gusti Ketut Agung Ulupui, Argie Destri Rahmani, Dwi Handarini, & Hafifah Nasution. (2021). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 Pada Perusahaan Agrikultur. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.84>
- International Accounting Standards Board. (2021). *IAS 41 Agriculture*. London: IFRS Foundation.
- ICAEW Thought Leadership Information For Better Markets. (2006) *Measurement in financial reporting*. [www.icaew.co.uk/bettermarkets](http://www.icaew.co.uk/bettermarkets).
- Kemendes PDTT. (2022). *Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Koesnyawati, K. K., & Syurmita (2023). Analisis Pendekatan Nilai Wajar Dan Nilai Historis Dalam Mengukur Aset Biologis Perusahaan Perkebunan Di Indonesia, Singapura, Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (Vol. 7, No. 1).
- Mauldyda, T., Ningsih, H., & Wibowo, D. (2022). *Implementasi Penerapan Psak 241 Atas Aset Biologis Di Safwana Koi Farm*. [www.kominfo.jatimprov.go.id](http://www.kominfo.jatimprov.go.id).
- Prakoso, N. A., Harahap, M. N., & Nasution, R. (n.d.). Effect Of Current Ratio, Debt-To-Equity Ratio, Return On Assets, And Company Size On The Risk Of Business Failure (Empirical Study Of Food And Beverage Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, 2024(3), 552–568. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10642592>
- Putri, V. A., Andari, A. T., Fitriani, D. R., & Malang, P. N. (2024). *Analysis of Biological Assets Measurement and Treatment by Using Fair value and Historical cost Approaches on Plantatiton Entities Based on PSAK 69 (Study in PT Dewi Sri)*.
- Putra, R., & Fitriani, R. (2023). Evaluasi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Sumber Rejeki.” In *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING* (Vol. 7).
- Rachmawati, Y., Oktariyani, A., & Ermina. (2019). Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 pada Perusahaan Perkebunan (Studi Kasus PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk). *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 130–145.
- Stárová, M., Čermáková, H., Hlavsa, T., Vostrovská, H., & Levá, M. (2016). Evaluation of applicability of IAS 41 - Agriculture to the valuation of growing forest stands and their accounting treatment in the Czech Republic. *Journal of Forest Science*, 62(9), 429–440. <https://doi.org/10.17221/59/2016-JFS>
- Sulistiyowati, E., Kristiawan, A., Setyawardani, L., Dewi, M. A., & Nugraheni, R. (2024). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Akuntabilitas Pelaporan Dalam Upaya Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Sesuai SAK ETAP. *Owner*, 8(4), 4798–4807. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2399>